

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PERWAKILAN DIPLOMATIK TERHADAP
WARGA NEGARA INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DI MALAYSIA**

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

OLEH

FAUZI GUNAWAN

1310111154



Pembimbing :

Dr. Najmi, S.H., M.H

Magdariza, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2018

**PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PERWAKILAN DIPLOMATIK TERHADAP
WARGA NEGARA INDONESIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN DI MALAYSIA**

(Fauzi Gunawan, 131O11154, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2018, 56 halaman)

Pembimbing : Dr. Najmi. SH, MH dan Hj. Magdariza. SH, MH

ABSTRAK

Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia di negara penerima adalah mewakili Negara Indonesia untuk melindungi kepentingan negara dan Warga Negara Indonesia. Tindak pidana pembunuhan yang disangkakan terhadap Siti Aisyah di Negara Malaysia merupakan salah satu kasus yang menjadi pokok dalam pembahasan ini. Didasari hal tersebut, penulis kemudian tertarik untuk meneliti tentang “Perlindungan Hukum oleh Perwakilan Diplomatik terhadap Warga Negara Indonesia yang Melakukan Tindak Pidana di Malaysia”. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis (normatif) dengan menekankan aspek hukum berkenaan dengan penerapannya. Jenis data yang digunakan data Sekunder melalui peraturan Internasional dan Nasional negara serta melalui studi kepustakaan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perwakilan Diplomatik yang berada di negara Malaysia telah mengupayakan dalam berbagai hal bantuan hukum terhadap warga negara Indonesia termasuk Siti Aisyah yang melakukan tindak pidana di negara Malaysia. Karena pentingnya suatu pemberitahuan kepada diplomat ataupun pos konsuler terhadap kasus hukum yang tengah dialami oleh warga negara di negara penerima, dan jika pemberitahuan tersebut tidak dijalankan akan terjadinya kesenjangan hukum bagi warga negara dikarenakan otoritas dari negara Malaysia tidak menjalankan kewajiban yang sebagaimana mestinya harus dilakukan oleh negara penerima yang terdapat pada Konvensi Wina 1963. Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah tersebut antara lain harus adanya kerja sama semua pihak, mulai dari Warga Negara Indonesia yang menetap lama ataupun sementara di negara Malaysia dengan menjaga tingkah laku dan tidak melakukan perbuatan melawan hukum agar tidak mendapatkan sanksi yang berakibat di hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku di wilayah hukum negara Malaysia, serta perwakilan diplomatik Indonesia yang bertugas melindungi kepentingan warga negara agar selalu memprioritaskan kepentingan negara maupun warga negara nya dan juga terhadap pemerintah Malaysia yang sebaiknya agar selalu konsisten dalam menjaga hubungan baik antar kedua negara dalam bidang apapun.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Warga Negara Indonesia, tindak pidana pembunuhan.

Kata Kunci : Perlindungan hukum, Warga Negara Indonesia, tindak pidana pembunuhan.

**THE PROTECTION OF THE LAW BY A DIPLOMATIC REPRESENTATIVE
AGAINST INDONESIAN CITIZENS WHO COMMITTED THE CRIMES OF THE
MURDERS IN MALYSIAN**

(Fauzi Gunawan, 1310111154, Faculty Of Law, Andalas University, 2018, 56 Pages)

Advisor : Dr. Najmi. SH, MH and Hj. Magdariza. SH, MH

ABSTRACT

The Indonesian Government's Diplomatic representation, in the recipient's state is representing the Indonesian state to protect the interest of national and Indonesian citizens. The alleged crime of murder to Siti Aisyah in Malaysian is one of the cases being the subject of the discussion. On the basis of this, the writer is then interested in examining the "Legal Protection by Diplomatic Representatives of Indonesian citizens who have Committed Criminal ACTS in Malaysia". The method of the nresearch used in this study is yuridis (normatif) by emphasizing aspects of the law regarding its application. The type of data used by secondary data trough study of literature. The result of the study my be concluded that the Diplomatic representative of the state of the state of Malaysia have been seeking in various ways the legal aid of Indonesian citizens include Siti Aisyah, who commits criminal ACTS in the Malaysian state. Because of the importance of the announcement to diplomats or consults to the legal cases experienced by bthe citizens of the state of the recipient, and if such notice is not observed, it will be a violation of the law for citizens because the Malaysian authorities did not observe the duties that the recipient of the existing administration was supposed to implement at the 1963 Wina Convention. The solution offered to solv such problems include all parties, from the Indonesian citizens who settled for long or while in the country of Malaysia by maintaining conduct and doing ilegal ACTS against the law so as not to result in legal penalties that apply to the laws that apply in the land of the Malaysian state, as well as Indonesian representative in charge of protecting the state's interest to prioritize the country's interest as will as its citizens as well as on the Malaysian goverment that should always be consistent in keeping a good relationship between the two countries in any areas.

Keyword : Legal Protection, Indonesian Citizen, A criminal act of murder.